

# ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BONE DALAM PENGEMBALIAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (Fokus pada Analisis *Debt Service Coverage Ratio*)

A. Nurul Aulia Arsyad

NPP. 30.1163

*Asdaf Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: nurulauliaarsyad23@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Elvira Mulya Nalien, S.IP., M.Si.

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Regional loans have consequences for regions in making payments on loans at a specified time. Of course this burdens regional finances. **Purpose:** This thesis aims to find out how the financial capacity of Bone Regency in repaying PEN loans for the next eight years, is measured using one of the financial ratio analyzes, namely Debt Service Coverage Ratio (DSCR) by Mahmudi. **Method:** Writing this thesis using a Qualitative Approach, Descriptive Method and Inductive Thinking Framework. Data collection techniques in the form of semi-structured interviews, passive participatory observation and documentation. Data analysis techniques consist of data validation, organizing data, presenting findings, validating findings and interpreting findings. **Result:** The results of the study show that Bone Regency has the ability to repay PEN loans for the next 8 years and meets the minimum DSCR score criteria that is 2,5. In 2022 the score is 20,88 point, 15,92 point in 2023, 4,25 point in 2024, 3,89 point in 2025, in 2026 it was 3,7 point, in 2027 it was 3,51 point, in 2028 it was 3,29 point and in 2029 it was 3,04 point. There were no obstacles in repaying the PEN loan, but in 2024 regional finances are predicted to be burdened due to the holding of regional elections. In addition to anticipating the budget deficit that is likely to occur in 2024 due to regional elections by budgeting reserve funds. Starting in 2022 and to be disbursed in 2024. In order to ease the regional financial burden, especially in 2024 in addition to regional obligations to pay debts. **Conclusion:** Bone Regency has the ability to repay PEN loans, that's approve by minimum DSCR score criteria is 2,5 point.

**Keywords:** DSCR, Financial Capability, PEN Loan

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pinjaman daerah memberikan konsekuensi bagi daerah untuk melakukan pembayaran atas pinjaman pada waktu yang ditentukan. Tentu saja hal ini membebankan keuangan daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan keuangan Kabupaten Bone dalam melakukan pengembalian pinjaman PEN selama delapan tahun ke depan, diukur menggunakan salah satu analisis rasio keuangan yaitu *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) oleh Mahmudi. **Metode:** Pada penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif, Metode Deskriptif dan Kerangka Berpikir Induktif. Teknik pengumpulan data berupa Wawancara Semi Terstruktur, Observasi Partisipasi Pasif dan Dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari validasi data, mengorganisasi data, menyajikan temuan, validasi temuan dan

menafsirkan temuan. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bone memiliki kemampuan dalam pengembalian pinjaman PEN selama 8 tahun mendatang dan memenuhi kriteria nilai minimum DSCR yaitu 2,5. Tahun 2022 sebesar 20,88 *point*, tahun 2023 sebesar 15,92 *point*, tahun 2024 sebesar 4,25 *point*, tahun 2025 sebesar 3,89 *point*, tahun 2026 sebesar 3,71 *point*, tahun 2027 sebesar 3,51 *point*, tahun 2028 sebesar 3,29 *point* dan tahun 2029 sebesar 3,04 *point*. Tidak diperoleh hambatan dalam pengembalian pinjaman PEN namun pada tahun 2024 keuangan daerah diprediksi akan terbebani karena dilaksanakannya pilkada. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi defisit anggaran yang kemungkinan terjadi pada tahun 2024 yaitu dengan dengan menganggarkan dana cadangan. Dimulai pada tahun 2022 dan dapat dicairkan pada tahun 2024. Demi meringankan beban keuangan daerah khususnya pada tahun 2024 disamping kewajiban daerah dalam membayar utang. **Kesimpulan:** Kabupaten Bone memiliki kemampuan keuangan dalam pengembalian pinjaman PEN yang dibuktikan dengan nilai DSCR yang telah memenuhi kriteria di atas 2,5 *point*.

**Kata Kunci:** DSCR, Kemampuan Keuangan, Pinjaman PEN

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pandemi *Coronavirus disease 2019 (Covid-19)* menjangkiti Indonesia pada pertengahan tahun 2019 dan membawa pengaruh yang signifikan terhadap penurunan ekonomi. Berbagai kebijakan dalam hal pembatasan kegiatan masyarakat berujung pada terganggunya perputaran ekonomi daerah sehingga berdampak pada pendapatan daerah yang menurun. Adanya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran dalam hal penanganan pandemi *Covid-19* memaksa pemerintah daerah untuk segera mencari solusi agar kegiatan pembangunan daerah berjalan beriringan bersama dengan penanganan pandemi *Covid-19*. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mencari sumber-sumber lain pendapatan daerah. Salah satu alternatifnya yaitu dengan pinjaman daerah.

Kabupaten Bone termasuk salah satu kabupaten yang menerima pinjaman daerah. Pinjaman daerah yang dimaksud adalah pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adanya pandemi *Covid-19* membuat pendapatan daerah Kabupaten Bone mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan terhadap pendapatan daerah ini membuat laju kegiatan pembangunan daerah menjadi lambat. Hal ini dikarenakan seluruh kebijakan pemerintah difokuskan dalam penanganan *Covid-19*. Sebagai salah satu daerah yang terdampak *Covid-19* dalam menunjang pendapatan daerahnya maka Kabupaten Bone mengadakan pinjaman PEN dan per tanggal 29 Desember 2021 telah menerima suntikan dana pinjaman PEN sebesar Rp278 Miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pinjaman PEN tersebut telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone dan telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone tahun 2021.

Pinjaman ini dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka memulihkan perekonomian daerah yang terdampak pandemi *Covid-19* khususnya di Kabupaten Bone. Akan tetapi, pinjaman daerah berakibat terhadap kewajiban daerah dalam pengembalian angsuran pokok pinjaman beserta dengan bunga pinjaman. Pengembalian angsuran pokok dan bunga pinjaman ini merupakan tantangan kepada pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik disamping juga melakukan pengembalian pinjaman. Oleh karena itu, daerah dituntut untuk cerdas dalam mengelola keuangan daerahnya. Dimaksudkan agar daerah memiliki kemampuan fiskal dalam melakukan pelunasan pinjaman misalnya dapat dilihat dari besaran pendapatan daerah yang dimiliki.

Selain tingkat kemampuan fiskal daerah, pelaksanaan pinjaman daerah juga harus memperhatikan nilai DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*) yang ditentukan yaitu bernilai minimal 2,5 sesuai yang

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. DSCR adalah perbandingan antara total Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagian daerah (*revenue sharing*) dan Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi dengan belanja wajib; dengan total angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Nilai DSCR tersebut dapat menentukan besaran kemampuan keuangan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bone dalam melaksanakan pembayaran kembali pokok pinjaman. Nilai DSCR diketahui dengan melihat proyeksi pendapatan dan belanja daerah pada tahun pinjaman berjalan. Proyeksi tersebut berguna untuk menghitung besaran nilai DSCR pemerintah daerah sehingga dapat dinilai kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bone dalam pengembalian pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini. Pertama yaitu berkenaan dengan konsekuensi daerah dalam melakukan pinjaman yakni kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam mengembalikan angsuran pokok pinjaman PEN, diketahui bahwa pinjaman ini akan diangsur selama 8 (delapan) tahun dengan bunga 6,19% per tahun. Pengembalian dana pada tahun pertama dan tahun kedua hanya dibebankan pada pembayaran bunga pinjaman. Sedangkan tahun ketiga sampai dengan tahun kedelapan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone wajib membayar pokok pinjaman disertai dengan bunga yang ada. Mekanisme sistem pelunasan pinjaman yang membebankan daerah di masa-masa akhir pelunasan pinjaman, membuat daerah dituntut untuk cerdas dalam mengelola keuangan daerahnya.

Kedua yaitu proses angsuran pinjaman PEN berdampak terhadap pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga dari pemotongan DAU tersebut akan berefek terhadap berkurangnya alokasi dana terhadap kegiatan pemerintahan lainnya terkhusus yang menggunakan alokasi DAU. Selanjutnya, mengenai pinjaman PEN merupakan jangka panjang yang pelunasannya dilakukan selama 8 tahun sehingga dalam proses angsuran tersebut dirasakan oleh dua kepemimpinan Bupati yang berbeda. Adanya angsuran pengembalian pinjaman yang membebankan keuangan daerah setiap tahunnya, tentu akan berpengaruh terhadap program kerja Bupati selanjutnya.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan konteks kemampuan keuangan daerah dalam pengembalian pinjaman hal ini diukur dengan menggunakan salah satu rasio keuangan yaitu *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR). Penelitian Yulitiawati dan Ana Mustika berjudul Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013-2017 (Yulitiawati & Mustika, 2020), menemukan bahwa nilai *Debt Service Coverage Ratio* Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2014 sebesar 30,80. Sedangkan pada tahun lainnya, nilai *Debt Service Coverage Ratio* yang diperoleh nihil dikarenakan hanya pada tahun 2014 Kabupaten Ogan Komering Ulu dibebankan pengembalian pokok pinjaman. Penelitian Silvi Reni Cusyana dan Nurwati menemukan bahwa Kota Depok memiliki kinerja keuangan yang efektif dilihat dari nilai *Debt Service Coverage Ratio* yang bernilai di atas nilai minimum (Cusyana & Nurwati, 2020). Penelitian William Indra S., Abdul Wahab Podungge, dan Muliyani Mahmud menemukan bahwa Kabupaten Bone Bolango dapat melakukan pengembalian angsuran pokok pinjaman pada tahun 2022 hingga 2026 dilihat dari besaran nilai DSCR yang diperoleh di atas dari nilai minimum yang seharusnya yaitu 2,5 (Mooduto et al., 2021). Penelitian Nita Hasnita yang melakukan pengukuran mengenai kinerja keuangan Kota Kendari dengan menggunakan beberapa analisis rasio keuangan salah satunya *Debt Service Coverage Ratio*. Hasil dari penelitian tersebut diperoleh nilai *Debt Service Coverage Ratio* yang di atas nilai minimum 2,5 *point* (Hasnita, 2021). Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian Sudarlan, Yulius G.S., dan Nurin Anggraini mengenai analisis pinjaman daerah sebagai alternatif

pembiayaan pembangunan daerah Kutai Kartanegara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan dikarenakan tidak ada pinjaman jangka panjang maupun jangka menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maka tidak ada hasil dalam perhitungan *Debt Service Coverage Ratio*. Sebaliknya, pada hasil dari analisis utang terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai yang sangat tidak baik. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat mengandalkan Pendapatan Asli Daerah dalam pengembalian kewajiban jangka pendek (Sudarlan et al., 2018).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana pada penelitian yang dilakukan penulis mengandung unsur *novelty* atau kebaruan dimana pada penelitian sebelumnya ukuran kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman dilihat dari nilai *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) yang telah lalu. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan proyeksi pendapatan daerah dengan Analisis *Trend* yaitu metode kuadrat tekecil lalu setelah melakukan proyeksi terhadap pendapatan daerah maka dilakukan perhitungan nilai *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) dimasa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Oleh karena itu, diharapkan penelitian yang dilakukan penulis dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah daerah terutama Kabupaten Bone untuk memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone mengembalikan pinjaman PEN jika diukur dengan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) pada tahun pinjaman berjalan

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif, Metode Deskriptif dan Kerangka Berpikir Induktif dalam mengetahui kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman PEN. Pendekatan Kualitatif Pendekatan Kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016). Pada penelitian ini digunakan Pendekatan Kualitatif untuk dapat mengkonseptualisasikan objek penelitian dengan menggunakan suatu sistem konsep, asumsi dan teori yang dapat menginformasikan penelitian yang dikaji, dimulai merumuskan pertanyaan untuk keputusan metodologi dan pengumpulan data serta prosedur analisis (Riazi, 2016).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data kualitatif tersebut, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari kepala Badan Keuangan dan Aset (BKAD) Kabupaten Bone, sekretaris BKAD Kabupaten Bone, kepala bidang perencanaan anggaran BKAD Kabupaten Bone, kepala bidang perbendaharaan BKAD Kabupaten Bone, kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone 1 orang, dan salah satu Masyarakat Kabupaten Bone dalam hal ini masyarakat Desa Kalero yang merasakan langsung realisasi dari pinjaman PEN tersebut. Adapun pengumpulan data Kuantitatif dengan mengambil data berdasarkan dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bone tahun 2018 hingga 2022 serta dokumen laporan progress pinjaman PEN Kabupaten Bone. Adapun analisisnya menggunakan *Debt Service Coverage Ratio* oleh Mahmudi (Mahmudi, 2019) yang menyatakan bahwa kemampuan daerah dalam pengembalian pinjaman jangka panjang dapat diketahui dengan nilai DSCR yang bernilai minimal 2,5 *point*.

Adapun sebelum melakukan perhitungan DSCR, dilakukan proyeksi terhadap pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi dan Belanja Wajib menggunakan Persamaan *Trend*. Persamaan *trend* menggunakan data *time series* (data berkala) yaitu data yang disusun berdasarkan urutan waktu atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu (Maryati, 2010). Berdasarkan data *time series* yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, akan digunakan pada persamaan *trend* untuk mengetahui proyeksi kondisi keuangan pada masa mendatang. Adapun metode persamaan *trend* yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan metode jumlah kuadrat terkecil (*the least square method*). Perhitungan ini dapat dibantu dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel*.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kemampuan keuangan daerah dalam pengembalian pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Bone dengan menggunakan analisis *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) pada tahun pinjaman berjalan yaitu tahun 2022 hingga tahun 2029. Adapun kriteria dalam pemenuhan nilai DSCR adalah minimal 2,5 *point*. Nilai DSCR tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan dari rumus yang sesuai dengan teori yang dijabarkan oleh Mahmudi. Sesuai dengan teknik analisis data yang telah penulis jabarkan sebelumnya dalam melakukan perhitungan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) terlebih dahulu penulis akan melakukan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) dan Belanja Wajib (BW) yang merupakan komponen yang termuat dalam rumus perhitungan DSCR. Pada proyeksi terhadap komponen atau indikator tersebut, penulis menggunakan menggunakan analisis data *Time Series* dengan menggunakan metode Persamaan *Trend*.

#### 3.1. Persamaan *Trend*

Metode Persamaan *Trend* yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan metode jumlah kuadrat terkecil (*the least square method*) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

Keterangan:

Y' : Nilai variabel dependen

a : *Intercept* Y, yakni nilai Y apabila X = 0 ( $\frac{\sum Y}{n}$ )

b : Lereng garis *trend* ( $\frac{\sum XY}{\sum X^2}$ )

X : Nilai variabel independen dalam *trend* adalah waktu

Persamaan *trend* di atas akan digunakan untuk melakukan proyeksi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR), dan Belanja Wajib (BW) selama delapan tahun ke depan. Hasil proyeksi tersebut digunakan sebagai dasar dalam penghitungan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR). Adapun perhitungan persamaan *trend* tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Perhitungan Persamaan *Trend* Pendapatan Asli Daerah

Tahun Anggaran	PAD (Y) dalam Rupiah	X	XY dalam Rupiah	X <sup>2</sup>
2018	199.472.831.779	-2	-398.945.663.558	4
2019	208.169.739.391	-1	-208.169.739.391	1
2020	250.562.915.028	0	0	0
2021	208.439.169.492	1	208.439.169.492	1
2022	199.957.946.226	2	399.915.892.452	4
Σ	1.066.602.601.916		1.239.658.995	10

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bone Tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel 1 di atas diperoleh persamaan *trend* untuk PAD yaitu  $Y' = 213.320.520.383 + 123.965.899 X$ , dimana **a** sebesar 213.320.520.383 dan **b** sebesar 123.965.899. Artinya untuk mengetahui proyeksi PAD tahun berikutnya yaitu dengan menerapkan persamaan *trend* yang diperoleh lalu mengganti koefisien **X** dengan waktu yang ingin diproyeksikan. Adapun berdasarkan persamaan *trend* yang diperoleh, terjadi *trend* positif yang berarti setiap tahunnya diproyeksikan PAD akan cenderung naik.

**Tabel 2 Perhitungan Persamaan Trend Dana Bagi Hasil**

Tahun Anggaran	DBH (Y) dalam Rupiah	X	XY dalam Rupiah	X <sup>2</sup>
2018	23.302.043.707	-2	-46.604.087.414	4
2019	17.179.515.954	-1	-17.179.515.954	1
2020	23.467.088.444	0	0	0
2021	36.295.771.309	1	36.295.771.309	1
2022	36.421.291.923	2	72.842.583.846	4
Σ	136.665.711.337		45.354.751.787	10

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bone Tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel 2 di atas diperoleh persamaan *trend* untuk DBH yaitu  $Y' = 27.333.142.267 + 4.535.475.179 X$ , dimana **a** sebesar 27.333.142.267 dan **b** sebesar 4.535.475.179. Artinya untuk mengetahui proyeksi DBH tahun berikutnya yaitu dengan menerapkan persamaan *trend* yang diperoleh lalu mengganti koefisien **X** dengan waktu yang ingin diproyeksikan. Adapun berdasarkan persamaan *trend* yang diperoleh, terjadi *trend* positif yang berarti setiap tahunnya diproyeksikan DBH akan cenderung naik.

**Tabel 3 Perhitungan Persamaan Trend Dana Alokasi Umum**

Tahun Anggaran	DAU (Y) dalam Rupiah	X	XY dalam Rupiah	X <sup>2</sup>
2018	1.070.426.493.000	-2	-2.140.852.986.000	4
2019	1.116.830.949.000	-1	-1.116.830.949.000	1
2020	1.015.212.018.000	0	0	0
2021	995.519.760.000	1	995.519.760.000	1
2022	996.360.633.000	2	1.992.721.266.000	4
Σ	5.194.349.853.000		- 269.442.909.000	10

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bone Tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel 3 di atas diperoleh persamaan *trend* untuk DAU yaitu  $Y' = 1.038.869.970.60 - 26.944.290.900 X$ , dimana **a** sebesar 1.302.419.034.211 dan **b** sebesar -26.944.290.900. Artinya untuk mengetahui proyeksi DAU tahun berikutnya yaitu dengan menerapkan persamaan *trend* yang diperoleh lalu mengganti koefisien **X** dengan waktu yang ingin diproyeksikan. Adapun berdasarkan persamaan *trend* yang diperoleh, terlihat bahwa terjadi *trend* negatif yang berarti setiap tahunnya diproyeksikan DAU akan cenderung menurun.

**Tabel 4 Perhitungan Persamaan Trend Belanja Wajib**

Tahun Anggaran	BW (Y) dalam Rupiah	X	XY dalam Rupiah	X <sup>2</sup>
2018	927.270.742.459	-2	-1.854.541.484.918	4
2019	924.153.976.001	-1	-924.153.976.001	1
2020	943.798.309.599	0	0	0
2021	934.813.058.962	1	934.813.058.962	1
2022	921.143.356.348	2	1.842.286.712.696	4
Σ	4.651.179.443.369		-1.595.689.261	10

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bone Tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel 4 di atas diperoleh persamaan *trend* untuk BW yaitu  $Y' = 930.235.888.674 - 159.568.926 X$ , dimana **a** sebesar 930.235.888.674 dan **b** sebesar 159.568.926. Artinya untuk mengetahui proyeksi BW tahun berikutnya yaitu dengan menerapkan persamaan *trend* yang diperoleh lalu mengganti koefisien **X** dengan waktu yang ingin diproyeksikan. Adapun berdasarkan persamaan *trend* yang diperoleh, terlihat bahwa terjadi *trend* negatif yang berarti setiap tahunnya diproyeksikan BW akan cenderung menurun. Sedangkan, perhitungan Dana Bagi

Hasil Dana Reboisasi tidak dilakukan penulis disebabkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone tidak terdapat akun tersebut. Oleh karena itu dikarenakan Dana Reboisasi tidak dianggarkan maka pada penelitian ini nilainya dianggap nol.

### 3.2. Perhitungan Proyeksi PAD, DBH, DAU, dan BW

Pada perhitungan proyeksi PAD, DBH, DAU dan BW dilakukan berdasarkan persamaan *trend* yang telah diperoleh sebelumnya. Proyeksi yang dilakukan yaitu selama jangka waktu atau periode pengembalian pinjaman PEN dalam hal ini yaitu 8 tahun (2022-2029). Proyeksi PAD, DBH, DAU dan BW dilakukan sebelum melakukan perhitungan DSCR. Proyeksi tersebut digunakan untuk menghitung nilai *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) setiap tahunnya selama periode pengembalian pinjaman. Adapun berdasarkan persamaan *trend* di atas maka proyeksi PAD, DBH, DAU dan BW dapat disajikan pada grafik di bawah ini:

**Grafik 1 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah**



Sumber: Diolah Penulis berdasarkan perhitungan persamaan *trend*

Berdasarkan grafik 1 di atas memperlihatkan proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone dari tahun 2022 hingga 2029 yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 jumlah PAD Kabupaten Bone sebesar Rp199.957.946.226. Selanjutnya pada tahun berikutnya menjadi Rp213.692.418.082. Dilanjutkan pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp213.816.383.981. Pada tahun 2025 proyeksi PAD menjadi Rp213.940.349.881. Sedangkan pada tahun 2026 sebesar Rp214.064.315.780. Dilanjutkan pada tahun 2027 sebesar Rp214.188.281.680. Sedangkan pada tahun 2028 kembali naik menjadi Rp214.312.247.579. Di akhir periode pinjaman, PAD diprediksi akan berjumlah sebesar Rp214.436.213.479.

**Grafik 2 Proyeksi Dana Bagi Hasil**

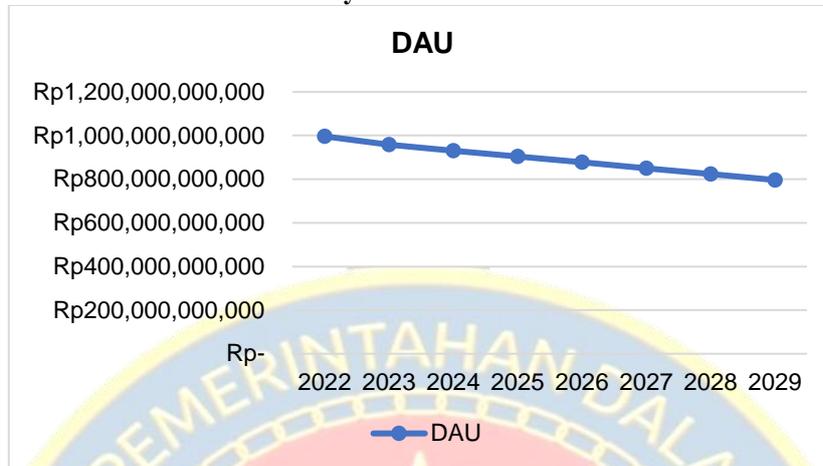


Sumber: Diolah Penulis berdasarkan perhitungan persamaan *trend*

Berdasarkan grafik 2 di atas memperlihatkan proyeksi Dana Bagi Hasil Kabupaten Bone dari tahun 2022 hingga 2029 yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 jumlah DBH Kabupaten Bone sebesar Rp36.421.291.923. Selanjutnya pada tahun berikutnya menjadi Rp40.939.567.804. Dilanjutkan pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp45.475.042.982. Pada tahun 2025 proyeksi DBH

menjadi Rp50.010.518.161. Sedangkan pada tahun 2026 sebesar Rp54.545.993.340. Dilanjutkan pada tahun 2027 sebesar Rp59.081.468.518. Sedangkan pada tahun 2028 kembali naik menjadi Rp63.616.943.697. Di akhir periode pinjaman, DBH diprediksi akan berjumlah sebesar Rp68.152.418.876.

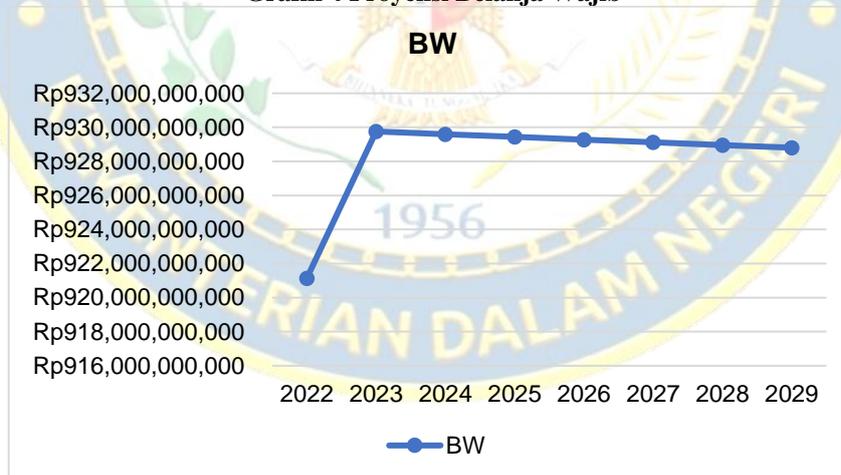
**Grafik 3 Proyeksi Dana Alokasi Umum**



*Sumber: Diolah Penulis berdasarkan perhitungan persamaan trend*

Berdasarkan grafik 3 di atas memperlihatkan proyeksi Dana Alokasi Umum Kabupaten Bone dari tahun 2022 hingga 2029 yang terus mengalami penurunan. Pada tahun 2022 jumlah DAU Kabupaten Bone sebesar Rp996.360.633.000. Selanjutnya pada tahun berikutnya menjadi Rp958.037.097.900. Dilanjutkan pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp931.092.807.000. Pada tahun 2025 proyeksi DAU menjadi Rp904.148.516.100. Sedangkan pada tahun 2026 sebesar Rp877.204.225.200. Dilanjutkan pada tahun 2027 sebesar Rp850.259.934.300. Sedangkan pada tahun 2028 kembali menurun menjadi Rp823.315.643.400. Di akhir periode pinjaman, DAU diprediksi akan berjumlah sebesar Rp796.371.352.500.

**Grafik 4 Proyeksi Belanja Wajib**



*Sumber: Diolah Penulis berdasarkan perhitungan persamaan trend*

Berdasarkan grafik 4 di atas memperlihatkan proyeksi Belanja Wajib Kabupaten Bone dari tahun 2022 hingga 2029 yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 jumlah BW Kabupaten Bone sebesar Rp921.143.356.348. Selanjutnya pada tahun berikutnya menjadi Rp929.757.181.896. Dilanjutkan pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp929.597.612.969. Pada tahun 2025 proyeksi BW menjadi Rp929.438.044.043. Sedangkan pada tahun 2026 sebesar Rp929.278.475.117. Dilanjutkan pada tahun 2027 sebesar Rp929.118.906.191. Sedangkan pada tahun 2028 kembali meningkat menjadi Rp928.959.337.265. Di akhir periode pinjaman, BW diprediksi akan berjumlah sebesar Rp928.799.768.339.

### 3.3. Perhitungan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

DSCR merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pembayaran kembali pinjaman daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{\{PAD + DAU + (DBH - DBHDR)\} - BW}{Pokok\ pinjaman + Bunga + BL}$$

Nilai DSCR menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman jangka panjang. Besaran nilai tersebut memiliki kriteria tertentu yang menunjukkan cakupan nilai minimal bagi daerah untuk dapat dikatakan mampu dalam mengembalikan pinjaman. Suatu daerah dikatakan dapat melakukan pengembalian pinjaman apabila nilai DSCR yang dihasilkan sebesar minimal 2,5. Apabila perolehan nilai DSCR kurang dari 2,5 maka hal tersebut dapat diprediksi akan terjadi arus kas negatif (Mahmudi, 2019).

Setelah sebelumnya penulis telah melakukan proyeksi terhadap indikator-indikator yang menjadi rumus DSCR yakni PAD, DBH, DAU dan BW maka data lainnya yang dibutuhkan sebelum menghitung nilai DSCR adalah besaran angsuran pokok pinjaman, bunga pinjaman serta biaya lain yang menyertai pinjaman PEN. Adapun data tersebut telah penulis peroleh pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone yang terdapat di dalam Laporan Progress Pinjaman PEN Kabupaten Bone, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 5 Angsuran Pengembalian Pinjaman PEN Kabupaten Bone**

Tahun	Jumlah Pembayaran (Rupiah)			Saldo Pinjaman (Rupiah)
	Pokok Pinjaman	Bunga Pinjaman	Biaya Pengelolaan	
2022	0	14.405.891.025,78	515.718.904,31	278.766.975.305
2023	0	17.255.678.771,38	515.718.904,31	278.766.975.305
2024	46.461.162.550,83	14.379.729.809,48	515.718.904,31	232.305.812.754,17
2025	46.461.162.550,83	14.379.729.809,48	429.765.753,60	185.844.650.203,34
2026	46.461.162.550,83	11.503.783.847,59	343.812.602,88	139.383.487.652,51
2027	46.461.162.550,83	8.627.837.885,69	257.859.452,16	92.922.325.101,67
2028	46.461.162.550,83	5.751.891.923,79	171.906.301,44	46.461.162.550,84
2029	46.461.162.550,83	2.875.945.961,90	85.953.150,72	0

Sumber: Laporan Progress Pinjaman PEN Kabupaten Bone

Berdasarkan data di atas, tahun 2022 dan 2023 Kabupaten Bone tidak dibebankan untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman PEN. Hal ini dikarenakan PT SMI selaku pemberi pinjaman memberikan masa tenggang (*grace period*) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone selama dua tahun sehingga pada dua tahun pertama hanya wajib untuk membayarkan bunga pinjaman dan biaya pinjaman lainnya. Sesuai data yang diperoleh tersebut, penulis dapat melakukan perhitungan nilai DSCR untuk periode pinjaman PEN. Periode pinjaman PEN yang dimaksud adalah pada tahun 2022 hingga tahun 2029. Adapun nilai DSCR pinjaman PEN Kabupaten Bone dapat dilihat sebagai berikut

**Tabel 6 Nilai *Debt Service Coverage Ratio***

Tahun	Nilai DSCR
2022	20,88
2023	15,92
2024	4,25
2025	3,89
2026	3,71
2027	3,51
2028	3,29
2029	3,04

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan perhitungan DSCR

Sesuai tabel 6 di atas, memperlihatkan bahwa Kabupaten Bone memiliki kemampuan dalam mengembalikan pinjaman PEN. Hal tersebut sesuai dengan kriteria nilai minimum DSCR untuk dapat dikatakan mampu mengembalikan pinjaman yaitu bernilai sebesar 2,5 *point*.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, Kabupaten Bone memiliki nilai DSCR yang tertinggi pada tahun 2022 dan 2023. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan Kabupaten Bone diberikan *greace period* (masa tenggang) selama 2 tahun untuk tidak melakukan pembayaran pokok pinjaman PEN. Oleh karena itu pada tahun tersebut Pemerintah Kabupaten Bone mendapatkan keringanan atau kemudahan.

Jika dilihat pada tahun 2024 hingga tahun 2029, rata-rata nilai DSCR yang diperoleh yaitu antara 3,00 sampai dengan 4,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, nilai tersebut jauh lebih kecil. Akan tetapi, hal tersebut tidak menutup kenyataan bahwa Kabupaten Bone mampu mengembalikan pinjaman. Rendahnya nilai DSCR yang diperoleh pada tahun 2024 hingga tahun 2029 dikarenakan pada tahun tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone sudah diwajibkan untuk mengangsur pokok pinjaman PEN, disertai membayar bunga pinjaman yang ada. Oleh karena itu berdasarkan analisis nilai DSCR di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone memiliki kemampuan keuangan untuk mengembalikan pinjaman PEN.

Jika dilihat dari nilai manfaat pinjaman PEN itu sendiri, besaran angsuran pengembalian pinjaman PEN setiap tahunnya sekiranya berbanding lurus dengan realisasi pinjaman PEN yang difokuskan kepada pembangunan infrastruktur daerah berupa pembangunan beberapa ruas jalan dan jembatan di Kabupaten Bone. Berdasarkan besaran nilai pinjaman PEN yang diterima Kabupaten Bone yaitu kurang lebih sebesar Rp278 miliar pada tahun 2021, Kabupaten Bone telah membangun jalan dan jembatan diantaranya pada pengerjaan 13 paket pekerjaan, 61 ruang, dengan panjang 96 kilometer serta 4 jembatan. Jika dikonversi dengan panjang jalan yaitu sekitar 20 km beton dan 70 km *Hotmix*.

Pembangunan tersebut sekiranya akan berbanding lurus dengan berkurangnya alokasi anggaran pembangunan daerah pada tahun selanjutnya. Hal tersebut dikarenakan adanya standar harga belanja dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan ataupun betonisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan tahun berikutnya misal tahun 2024, kemungkinan besar akan mengalami kenaikan harga sebesar 50%. Contohnya saja, tahun 2021 pembangunan jalanan per meter *Hotmix* sebesar Rp2,5 juta. Namun, pada tahun 2024 bukan hal yang tidak mungkin bahkan sangat mungkin terjadi kenaikan harga menjadi Rp4,5 juta. Jadi, biaya yang dikeluarkan pada tahun 2021 merupakan biaya atau alokasi anggaran yang minimal sehingga hal tersebut memiliki nilai manfaat lebih.

Apabila Pemerintah Kabupaten Bone misalnya melakukan pembangunan pada tahun 2024 dengan alokasi anggaran yang sama dengan pinjaman PEN tersebut maka sekiranya yang akan terbangun kemungkinan hanya 50% dari yang sudah terbangun sekarang. Hal tersebut karena setiap tahunnya akan terjadi inflasi sehingga harga bahan akan melambung tinggi. Berikut merupakan salah satu realisasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bone dengan menggunakan pinjaman PEN.



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

**Gambar 1** Pembangunan Jembatan dengan Pinjaman PEN

Gambar tersebut merupakan gambar yang penulis peroleh pada saat berada langsung di lapangan. Pembangunan jembatan pada gambar tersebut termasuk dalam salah satu paket pekerjaan yang dibiayai dengan pinjaman PEN. Jembatan tersebut berada di Desa Kalero, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Jembatan tersebut dinamakan Jembatan Sungai Garimpang yang dibangun sepanjang 40 meter dengan biaya Rp6.812.047.000 dan dikerjakan selama 180 hari. Pembangunan jembatan ini telah selesai dilaksanakan dan telah terealisasi 100 persen. Berdasarkan hasil observasi penulis, pembangunan jembatan tersebut manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar terutama dalam mobilisasi hasil pertanian yang ada di Desa Kalero. Sesuai keterangan masyarakat Desa Kalero mengatakan bahwa mereka sangat bersyukur dengan adanya pembangunan jembatan yang sudah 13 tahun dalam kondisi rusak. Namun kini dengan terselesainya pembangunan jembatan tersebut, mobilitas masyarakat Desa Kalero dapat berjalan lancar.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengadaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sangat berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bone. Hal ini karena pembangunan infrastruktur yang dibiayai pinjaman PEN sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Walaupun pinjaman tersebut bisa saja membebankan keuangan daerah, namun hal ini berbanding lurus dengan manfaat yang diperoleh.

Adapun alur pengembalian Pinjaman PEN telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa pengembalian pinjaman akan dilakukan dengan cara diperhitungkan langsung dari penyaluran Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil). Bagi daerah yang mengajukan pinjaman PEN maka angsuran pengembalian pinjamannya akan langsung dipotong dari dana transfer umum dalam hal ini yaitu DAU dan/ atau DBH.

Akan tetapi, walaupun tidak ada hambatan dalam pengembalian pinjaman PEN, namun hal tersebut akan berdampak terhadap pembangunan daerah Kabupaten Bone khususnya pada tahun 2024. Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa pada tahun 2024 juga akan dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bone. Dana yang dibutuhkan cukup besar sehingga hal tersebut diprediksi akan membebankan keuangan daerah, di samping dilakukannya pemotongan DAU untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman PEN. Namun, Pemerintah Kabupaten Bone telah mengerti penuh akan hal tersebut dan telah mengambil langkah dengan menganggarkan dana cadangan secara bertahap dimulai pada tahun 2022, dimana dana cadangan tersebut akan dicairkan dan digunakan dalam mendukung Pilkada 2024 nantinya.

Berkaitan dengan dana cadangan yang dianggarkan, berdasarkan hasil observasi penulis yang diperoleh pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bone tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bone telah menganggarkan Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp5 miliar. Penganggaran dana cadangan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7 Dana Cadangan Kabupaten Bone Tahun 2022**

<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	
Pembentukan Dana Cadangan	Rp5.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	Rp10.000.000.000
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp15.000.000.000</b>

*Sumber: APBD Kabupaten Bone tahun 2022*

Oleh karena itu, upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Bone dalam pengembalian pinjaman PEN yaitu dengan melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengembalian pinjaman PEN yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan terhadap DAU dan dilakukan pencatatan sebagai belanja bunga pada APBD sehingga pelaporan keuangan berjalan dengan baik. Selanjutnya, berkenaan dengan dampak yang ditimbulkan dari pemotongan DAU tersebut khususnya pada tahun 2024 yakni berkurangnya alokasi biaya untuk pembangunan dikarenakan lebih fokus terhadap pemenuhan biaya pelaksanaan Pilkada Serentak maka Pemerintah Kabupaten Bone berupaya untuk menganggarkan pembentukan dana cadangan yang dimulai pada tahun 2022.

Nantinya, saat pelaksanaan Pilkada tahun 2024 akan dapat dicairkan dalam rangka mendukung jalannya pesta demokrasi tersebut.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Nilai *Debt Service Coverage Ratio* menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam pengembalian pinjaman. Jika dilihat dari nilai minimal yang dibutuhkan bagi daerah agar dapat mengembalikan pinjaman yakni 2,5 *point* maka berdasarkan perhitungan DSCR yang dilakukan oleh penulis membuktikan Kabupaten Bone memiliki kemampuan dalam mengembalikan pinjaman PEN. Sama halnya dengan temuan William Indra S., Abdul Wahab Podungge, dan Muliyani Mahmud yang menemukan bahwa Kabupaten Bone Bolango dapat melakukan pengembalian angsuran pokok pinjaman pada tahun 2022 hingga 2026 dilihat dari besaran nilai DSCR yang diperoleh yaitu di atas 2,5 *point* sehingga Kabupaten Bone Bolango layak menerima pinjaman (Mooduto et al., 2021). Berbeda dengan temuan penelitian Sudarlan, Yulius G.S., dan Nurin Anggraini yang tidak dapat melakukan perhitungan nilai DSCR Kabupaten Kutai Kartanegara dikarenakan tidak ada pinjaman jangka panjang maupun jangka menengah sehingga mengenai analisis pinjaman daerah dilakukan dengan analisis utang terhadap PAD dan menunjukkan nilai yang sangat tidak baik.

Nilai DSCR ini juga dapat memperlihatkan tingkat efektivitas kinerja keuangan daerah. Sama halnya penelitian yang dilakukan Silvi Reni Cusyana dan Nurwati menemukan bahwa Kota Depok memiliki kinerja keuangan yang efektif dilihat dari nilai *Debt Service Coverage Ratio* yang bernilai di atas nilai minimum (Cusyana & Nurwati, 2020). Sehingga, dari nilai DSCR pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa Kabupaten Bone memiliki kinerja keuangan yang efektif. Dilakukannya perhitungan DSCR ini juga memperkuat temuan penelitian sebelumnya dalam hal ini analisis pinjaman daerah untuk pengembalian pinjaman. Sesuai teori yang dikemukakan oleh Mahmudi bahwa nilai DSCR di atas 2,5 *point* memang benar menunjukkan bahwa daerah mampu dalam mengembalikan pinjaman sehingga daerah dapat dikatakan layak dalam menerima pinjaman. Hal ini dikarenakan salah satu kriteria kelayakan daerah dalam menerima pinjaman dilihat dari kemampuan daerah dalam pengembalian pinjaman tersebut.

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis tidak menemukan faktor penghambat dalam pengembalian pinjaman PEN. Hal tersebut dikarenakan pengembalian pinjaman PEN akan dilakukan dengan cara diperhitungkan langsung dari penyaluran Dana Alokasi Umum. Akan tetapi, adanya pemotongan DAU tersebut berdampak terhadap alokasi dana terhadap kegiatan pemerintahan lainnya khususnya Pilkada 2024 nanti. Oleh karena itu, agar keuangan daerah tidak terbebani dengan adanya angsuran pokok pinjaman setiap tahunnya maka pemerintah Kabupaten Bone menganggarkan dana cadangan untuk mengantisipasi beban keuangan daerah.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan nilai *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) yang telah dihitung oleh penulis, Kabupaten Bone memiliki kemampuan dalam pengembalian pinjaman PEN. Hal tersebut terbukti dari hasil perhitungan DSCR Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah memenuhi kriteria yaitu minimal 2,5. Pada tahun 2022 dan 2023 memiliki nilai DSCR tertinggi yaitu 20,88 dan 15,92. Dilanjutkan pada tahun 2024 nilai DSCR yaitu 4,25 *point*, tahun 2025 3,89 *point*, tahun 2026 sebesar 3,71 *point*, tahun 2027 sebesar 3,51 *point*, tahun 2028 sebesar 3,29 *point* dan tahun 2029 sebesar 3,04 *point* yang jika dirata-ratakan bernilai 3,00. Oleh karena itu, Selanjutnya dalam Proses angsuran pengembalian pinjaman PEN, tidak ditemukan hambatan yang berarti dikarenakan mekanismenya langsung dilakukan pemotongan alokasi DAU pada tahun berkenaan. Namun disaat bersamaan dengan pemotongan DAU tersebut, diprediksi akan memberatkan keuangan daerah khususnya saat pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Namun,

pemerintah Kabupaten Bone telah mengantisipasi terjadinya defisit anggaran pada tahun 2024 dengan menganggarkan dana cadangan sejak tahun 2022 yaitu sebesar Rp5 miliar. Nantinya pada saat pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 dana cadangan tersebut akan dapat dicairkan untuk mendukung jalannya pesta demokrasi tersebut.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya menggunakan satu jenis analisis pinjaman yaitu *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR). Oleh karena itu, dapat dilakukan analisis lain yang dapat melengkapi analisis DSCR untuk memperkuat analisis terhadap pinjaman daerah.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan analisis biaya manfaat (*cost benefit analyze*) dalam menilai kelayakan investasi publik yang dialokasikan dari dana Pinjaman PEN Daerah. Sehingga dapat diketahui tingkat kelayakan investasi publik yang dibiayai dengan pinjaman PEN.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone terkhusus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Masyarakat Kabupaten Bone khususnya Desa Kalero yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage.
- Cusyana, S. R., & Nurwati. (2020). Analisis Kinerja dan Kemampuan Keuangan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Depok: (Dari Sisi Sisa Pokok Pinjaman Daerah dan Debt Service Coverage Ratio). *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 2, 214–220.
- Hasnita, N. (2021). Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Pemerintah Kota Kendari. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(2), 230–240.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Keempat). UPP STIM YKPN.
- Maryati. (2010). *Statistika Ekonomi dan Bisnis*. (UPP) AMPYKPN.
- Mooduto, W. I. S., Podungge, A. W., & Mahmud, M. (2021). Menakar Kelayakan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah pada Kabupaten Bone Bolango. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 123–135. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i2.38>
- Riazi, A. M. (2016). *The Routledge Encyclopedia of Research Methods in Applied Linguistic: Quantitative, Qualitative, and Mixed-Methods Research*. Routledge.
- Sudarlan, Sampeallo, Y. G., & Anggraini, N. (2018). *Analisis Pinjaman Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara*. 1, 37–43.
- Yulitiawati, & Mustika, A. (2020). Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013 – 2017. *Jetap*, 1(1), 67–79.